

Strategi Ketahanan Pangan di DKI Jakarta Menunjang Ketahanan Nasional Melalui Strategi Kebijakan Perumda Pasar Jaya

Arief Nasrudin¹, A. J. Simon Runturambi²

^{1,2} Kajian Ketahanan Nasional, Sekolah Kajian Strategik dan Global, Universitas Indonesia

Email : ariefnass2@gmail.com¹, a.josias@ui.ac.id²

Abstrak

Pangan adalah salah satu pilar utama dalam membangun ketahanan nasional, Provinsi DKI Jakarta yang merupakan ibukota negara harus memiliki ketahanan pangan yang kuat dengan jumlah penduduk 10,56 juta jiwa. Kondisi tersebut menuntut strategi yang tepat dalam menjamin pemenuhan pangan bagi penduduk kota melalui badan usaha daerah yaitu Perumda Pasar Jaya. Tujuan penelitian ini untuk melihat strategi kebijakan yang dilakukan oleh Perumda Pasar Jaya dalam memperkuat dan menjamin pangan di DKI Jakarta dalam menunjang ketahanan nasional. Metode penelitian yang dilakukan dengan kualitatif digunakan untuk menggali dan mendalami setiap pribadi atau kelompok orang yang berasal dari problem sosial dan *Focus Discussion Group* (FGD). Hasil penelitian ini menghasilkan strategi yang tepat dilakukan adalah *Strength* dan *opportunity* yang termasuk strategi *growth* (pertumbuhan). Mendorong kolaborasi semua stakeholder yang dilakukan dengan kemitraan yang kuat, usaha yang memfokuskan aksi digitalisasi korporasi, perluasan bisnis yang ada dan kerjasama antar daerah.

Kata kunci: Ketahanan Pangan, Ketahanan Nasional, Strategi, Pasar Jaya

Abstract

Food is one of the main pillars in building national resilience, DKI Jakarta which is the capital city must have strong food security with a population of 11,00929 people. This condition requires the right strategy in ensuring food supply for the city's residents through a regional business entity, in this case Perumda Pasar Jaya. The purpose of this study is to look at the policy strategies carried out by Perumda Pasar Jaya in strengthening and guaranteeing food in DKI Jakarta in supporting national security. The research method that was carried out qualitatively was used to explore and explore each individual or group of people who came from social problems and Focus Discussion Groups (FGD). The results of this study resulted in the right strategy being carried out, namely Strength and opportunity which included a growth strategy. Encouraging collaboration of all stakeholders carried out with strong partnerships, efforts that focus on corporate digitalization, expansion of existing businesses and cooperation between regions.

Keywords: Food Security, National Security, Strategy, Pasar Jaya

PENDAHULUAN

Ketahanan pangan adalah konsep yang dirumuskan oleh lembaga-lembaga arus utama seperti FAO, Bank Dunia, dan sistem penelitian pertanian pangan internasional sebagai serta sebagian besar pemerintah nasional. Pandangan tentang ketahanan pangan sebagai masalah teknis produksi, distribusi, dan akses (wacana pembangunan secara umum) yang diabstraksikan dari konteks kebijakan, ekonomi dan budaya. Analisis memfokuskan ke struktur dan proses politik-ekonomi yang mendorong

produksi, distribusi dan akses ke pangan, dan pola terkait ketidaksetaraan dan kurangnya kedaulatan pangan. FAO dan lembaga lainnya mengadopsi pemahaman tentang ketahanan pangan dalam hal ketersediaan, akses, pemanfaatan dan stabilitas. Konsep ketahanan pangan pertama kali diperkenalkan pada tahun 1970-an setelah terjadi kelaparan global. Fokusnya adalah ketersediaan pangan, yang erat kaitannya dengan produksi pangan dan stabilitas harga pangan. Istilah ini bermula sebagai isu global, dengan perhatian dunia. Ketahanan pangan memiliki banyak definisi dan konsep, tergantung pada syarat dan ketentuannya.

Seiring berjalannya waktu, konsep tersebut menjadi lebih detail dan mencakup kajian teknis untuk mengukur ketahanan pangan. Definisi ketahanan pangan yang paling diterima secara luas dikeluarkan oleh *Food and Agricultural Organization* (FAO) pada tahun 2000. Ketahanan pangan dicapai ketika dipastikan bahwa semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik, sosial dan ekonomi ke pangan yang cukup, aman dan makanan bergizi, yang memenuhi kebutuhan makanan dan preferensi makanan mereka untuk hidup aktif dan sehat. Kebijakan pemerintah tentang pangan melalui meningkatkan efisiensi produktif melalui pasar. Sebagai contoh, dua prioritas kebijakan pertama dari Rencana Strategis Pembangunan Pertanian Indonesia adalah: (1) 'Meningkatkan swasembada beras dan meningkatkan produksi jagung, kedelai, gula, daging, cabai, dan bawang' tetapi juga (2) 'Mengembangkan kompetitif, produk substitusi ekspor dan impor serta bahan baku bioindustri'.

Peningkatan populasi yang terus-menerus telah menyebabkan perluasan permukiman perkotaan yang cepat: populasi global pada tahun 2050 akan menjadi 9 miliar, dengan individu terkonsentrasi di wilayah metropolitan. Orang yang tinggal di kota adalah konsumen pangan, dengan demikian, semakin tinggi tingkat urbanisasi, semakin lebih tinggi proporsi penduduk non-pertanian, dan kota-kota bergantung pada ketersediaan pangan dari pedesaan. Definisi ketahanan pangan yang paling umum adalah bahwa "Ketahanan pangan" ada ketika semua orang, setiap saat, memiliki akses fisik dan ekonomi terhadap pangan yang cukup, aman dan bergizi untuk memenuhi kebutuhan pangan mereka dan preferensi makanan untuk hidup aktif dan sehat". Ini diusulkan dalam 1996 pada *World Food Summit* (WFS), yang bertujuan untuk memusatkan perhatian internasional pada isu kelaparan.

Di tingkat global, jumlah orang yang kekurangan gizi telah menurun dalam dekade terakhir sekitar 167 juta, tetapi sekitar 793 juta orang masih menderita kelaparan dan jutaan orang dewasa perkotaan secara teratur kurang dari 2.100 kilo kalori yang direkomendasikan untuk hidup yang sehat dan aktif. Masalah makanan adalah menjadi masalah perkotaan di negara berkembang dan maju. Ketahanan pangan perkotaan telah diabaikan secara signifikan, terutama karena pengangguran, kepadatan penduduk, kerusakan infrastruktur dan isu-isu lain di lingkungan perkotaan menarik perhatian pembuat kebijakan dan perencana. Di negara berkembang, masalah ketahanan pangan sering dikaitkan akses makanan yang tidak mencukupi secara kritis. Ini negara sering mencoba untuk menyesuaikan sistem produksi pangan mereka untuk memenuhi tuntutan penduduk perkotaan yang semakin meningkat, baik dari segi pedesaan, sistem pangan pertanian dan sistem perkotaan yang semakin penting pertanian. Faktanya, pertanian perkotaan, yang berorientasi pada produksi subsisten dan komersial, sangat efektif dalam meningkatkan aksesibilitas pangan dan ketahanan pangan perkotaan secara umum, tetapi produksi sering terjadi di lingkungan tercemar yang melibatkan kesehatan. Untuk memenuhi ketersediaan pangan yang merata dan terjangkau diperlukan instrumen yang mampu mendistribusikan logistik ke masyarakat dengan kemampuan optimasi yang efektif. Pendistribusian logistik yang menjamin sampainya bahan pokok kebutuhan ke tangan masyarakat adalah keniscayaan untuk mewujudkan kesejahteraan. Ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang bisa dilihat dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau.

Permasalahan strategis dalam pembangunan ketahanan pangan dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu:

1. Produksi, ketersediaan dan kecukupan pangan di tingkat nasional, perkotaan, daerah dan rumah tangga;
2. Menjamin ketersediaan pangan, berupa pemerataan pangan antar wilayah, antar waktu dan antar golongan pendapatan masyarakat, termasuk keterjangkauan harga pangan strategis dengan manajemen dan distribusi yang baik.
3. Konsumsi, meliputi peningkatan kualitas konsumsi gizi, penganekaragaman pangan dan sistem ketahanan pangan dan gizi.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015, beras & bahan pangan pokok lainnya merupakan kebutuhan masyarakat khususnya perkotaan. Kebutuhan pangan pokok adalah barang-barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala besar pemenuhan kebutuhan dan menjadi faktor penunjang kesejahteraan masyarakat. Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai ibu kota negara dan kota terbesar di Indonesia haruslah memiliki strategi ketahanan pangan yang baik untuk menjamin ketersediaan pangan. DKI Jakarta yang memiliki luas kurang lebih 664,01 km² (lautan: 6 977,5 km²), dengan jumlah penduduk 11.009.29 jiwa merupakan kota metropolitan terbesar di Asia Tenggara dan kedua di dunia. Lebih dari 70% uang negara beredar di Jakarta. Perekonomian Jakarta terutama ditopang oleh sektor perdagangan, jasa, properti, industri kreatif, dan keuangan.

Perumda Pasar Jaya sebagai Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) memiliki fungsi strategis sebagai pilar ketahanan pangan di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Perumda Pasar Jaya merupakan salah satu pengelola Kawasan Pangan Nasional. Sektor hilir Perumda Pasar Jaya meliputi kegiatan pendistribusian bahan pangan dan komoditi lainnya. Perumda Pasar Jaya memiliki tugas menjaga stabilitas harga pangan di DKI Jakarta dan bertransformasi menjadi sebuah penjaga stabilitas harga dan informasi bahan pangan Nasional.

METODE

Penelitian dilakukan untuk mengetahui strategi kebijakan Pasar Jaya untuk menjaga kesinambungan pangan di Jakarta. Maka, pendekatan yang sesuai adalah kualitatif, dimana cara kualitatif digunakan untuk menggali dan mendalami setiap pribadi atau kelompok orang yang berasal dari problem sosial. Penelitian dilakukan melalui pertanyaan-pertanyaan, pengumpulan data yang detail dari informan, dianalisa dengan data dari yang bersifat khusus ke hal yang bersifat khusus (Creswell, 2016). Deskriptif menjadi pilihan dalam jenis penelitian ini, dimana penelitian deskriptif mencoba menjelaskan secara jelas sifat dan sikap individu, kondisi, atau sebaran sebuah gejala dalam masyarakat.

Pada kajian ini, akan digali informasi-informasi terkait strategi kebijakan BUMD dalam menjaga ketahanan pangan di Jakarta. Untuk mendapatkan informasi-informasi ini, tidak semua orang dapat menjadi informan. Dalam penelitian ini teknik pemilihan informan dilakukan atas dasar kebutuhan melalui penggunaan metode non probability sampling dengan purposive sampling, menurut Neuman *purposive sampling* adalah penarikan sampel tanpa random serta mencari semua kemungkinan kasus spesifik dan terfokus. Pada penelitian ini, data dikoleksi dari hasil wawancara dengan pemangku kebijakan. Hal lain yang dilakukan adalah pendekatan *Forum Group Discussion* (FGD), dengan FGD hal-hal dapat tergali secara kolektif dan informasi permasalahan akan didapat secara spesifik.

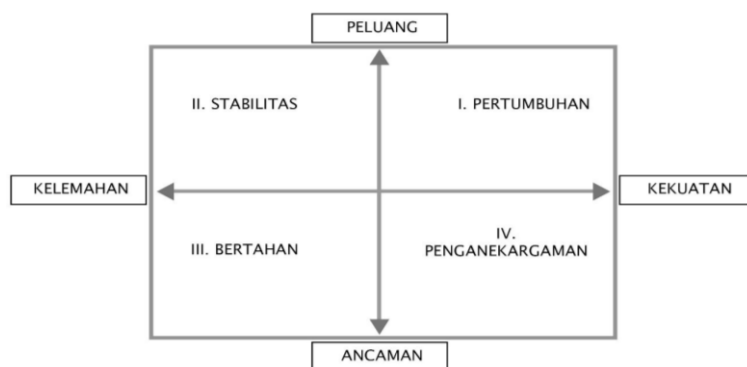
Selanjutnya adalah tahap pengklasifikasian dan pra analisis, pada tahap ini data dipisahkan menjadi data internal dan data eksternal (Rangkuti, 2005 : 21). Informasi yang didapat dari hasil wawancara dan FGD dirangkum dalam matriks SWOT dan dianalisa juga dengan memperhatikan faktor

eksternal dan eksternal yang ada. Faktor-faktor tersebut diolah melalui analisis Kekuatan (*Strengths*), Kelemahan (*Weakness*), Peluang (*Opportunities*) dan Ancaman (*Threats*) (SWOT) (Rangkuti, 2005 : 30). Proses penyusunan perencanaan strategi melalui tiga tahap analisis, yaitu:

1. Langkah pengumpulan data (dengan memperhatikan faktor eksternal dan internal).
2. Analisis masalah (Matriks SWOT, Matriks internal eksternal).
2. Pengambilan keputusan berdasarkan analisa.

Analisis SWOT adalah bagian dari dari metodologi analisis keputusan multikriteria, yang bertujuan untuk memperoleh perspektif dan gagasan pemangku kepentingan. Ini mewakili empat jenis faktor yang terdeteksi pada kuadran: kekuatan (sumber daya internal, keterampilan, dan kompetensi) yang dapat dimanfaatkan oleh suatu wilayah/organisasi; kelemahan (hambatan dan defisit internal) yang harus diatasi; peluang (peristiwa dan keadaan positif eksternal) yang dapat dimanfaatkannya; dan ancaman (risiko dan hambatan eksternal) yang harus dihindari untuk mencapai tujuan yang diusulkan. Dalam bentuk dasar aslinya, SWOT adalah analisis yang sepenuhnya kualitatif dan sederhana. Tetapi justru karena kesederhanaannya, ia memberikan hasil yang tidak diprioritaskan yang dapat dimanfaatkan oleh otoritas lokal sebagai legitimasi ilmiah dari - mungkin tidak populer - keputusan politik yang telah diambil. Untuk mengatasi masalah ini, literatur yang ada mengembangkan berbagai versi SWOT yang lebih baik, namun masih ada tingkat kesewenang-wenangan pengambilan keputusan yang relevan yang mencegah komunitas lokal dan pemangku kepentingan yang kurang kuat untuk benar-benar mempengaruhi pilihan akhir yang memengaruhi wilayah mereka sendiri. Sebagian besar analisis SWOT yang ditingkatkan didasarkan pada Matriks Perencanaan Strategis Kuantitatif atau *Quantitative Strategic Planning Matrix* (QSPM, David, 1986), Proses Hierarki Analitik untuk faktor independen atau *Analytical Hierarchy Process* (AHP, Saaty, 1977; Aczel dan Saaty, 1983) atau Proses Jaringan Analitik atau *Analytical Network Process* (ANP) untuk elemen yang saling bergantung (Saaty, 2013). Keuntungan QSPM terletak pada singkatnya kuesioner jika dibandingkan dengan metode lain, tetapi dapat menghasilkan banyak peringkat terikat, yang membuat pembuat kebijakan bebas untuk memilih strategi akhir secara sewenang-wenang. Sebaliknya, AHP dan ANP menghasilkan peringkat yang lebih konsisten, berdasarkan peringkat kepentingan relatif berpasangan, tetapi mereka membutuhkan banyak waktu dan usaha dari orang yang diwawancarai. Agar layak, perbandingan berpasangan biasanya hanya mencakup beberapa elemen SWOT yang telah dipilih sebelumnya atau dikumpulkan sebelumnya oleh para peneliti atau ahli, memperkenalkan kembali beberapa kesewenang-wenangan. Output dari analisis masih bisa menjadi strategi yang tidak layak, karena pertimbangan kelayakan mengenai faktor komplementaritas tidak langsung masuk ke dalam analisis (Dragouni et al., 2018).

Tujuan dari makalah ini adalah untuk mengusulkan analisis SWOT dalam pengambilan keputusan dan meningkatkan pada perencanaan, dengan menghasilkan strategi yang optimal, baik dari segi kesesuaian dengan visi dan kelayakan warga. Mendasarkan analisis ini maka secara diagramatik dapat digambarkan dengan diagram kartesius: Peluang (*Opportunities*), Kelemahan (*Weakness*) Kekuatan (*Strengths*) dan Ancaman (*Threats*) sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram Kartesius Kebijakan Strategis

Dalam menentukan sebuah kebijakan strategis yang akan diambil dapat ditentukan melalui kuadran. Perhitungannya dapat dilakukan melalui hitungan selisih dari titik pertama yang terdiri dari faktor kekuatan dan kelemahan dengan titik kedua yang terdiri dari faktor peluang dan ancaman. Pada kuadran pertama, situasi yang terjadi dalam kondisi positif dimana organisasi mempunyai peluang yang tinggi, untuk itu strategi yang cocok dengan kondisi ini adalah kebijakan agresif. Selanjutnya kuadran kedua, meski dalam kondisi penuh ancaman, organisasi mempunyai faktor internal sebagai kekuatan, strategi yang pas untuk dijalani adalah dengan memaksimalkan peluang jangka panjang melalui diversifikasi produk atau jasa yang dijual. Pada kuadran tiga, terdapat peluang yang cukup untuk mengatasi hambatan-hambatan dari dalam organisasi, sebagai strategi yang harus dilakukan adalah dengan memperkecil masalah yang terjadi di dalam untuk meraih peluang pasar yang ada. Terakhir adalah kuadran empat yakni saat suasana dan kondisi sudah tidak menguntungkan lagi sebab organisasi mendapatkan masalah bukan hanya ancaman tapi juga kelemahan dari faktor internal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perumda Pasar Jaya memiliki misi sebagai badan usaha yang memiliki tujuan memperoleh keuntungan, sekaligus berfungsi melayani publik dalam hal menjaga stabilitas bahan pangan. Perusahaan Daerah Pasar Jaya dibentuk atas dasar Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. Ib.3/2/15/66 pada tanggal 24 Desember 1966. lalu pengesahan oleh Menteri Dalam Negeri lewat Keputusan No. Ekbang 8/8/13--305 tanggal 23 Desember 1967.

Analisis SWOT untuk Pasar Jaya dalam Program Ketahanan Pangan

Pada penelitian ini akan disajikan gambaran yang menjelaskan secara detail atau metode kualitatif deskriptif melalui pendekatan SWOT. Analisis SWOT adalah proses tahapan dari perencanaan yang krusial dan dapat berpengaruh pada hasil pencapaian dan penentuan suatu tujuan organisasi (Istiqomah, 2017). Oleh karenanya, analisis SWOT menjadi sangat bermanfaat.

Berikut adalah wawancara serta FGD yang telah dilaksanakan untuk menjabarkan Analisa SWOT sebagai berikut:

a. Faktor kekuatan (*Strength*)

Adapun yang menjadi faktor kekuatan BUMD pasar Jaya dalam menjalankan strategi ketahanan pangan adalah adanya landasan hukum yang formil dan menjadi kekuatan dalam menjalankan operasional badan. BUMD yang merupakan bagian dari usaha milik daerah pemerintah DKI Jakarta memiliki modal yang cukup dan terjamin. Juga kuatnya jaminan untuk *governance* dan akses bisnis, disamping itu pemegang saham sebagai daya ungkit roda usaha memiliki kredibilitas yang kuat.

b. Faktor Kelemahan (*Weakness*)

BUMD Pasar Jaya adalah badan milik pemerintah daerah yang keberadaannya tidak lepas dari konstelasi politik yang ada di DKI Jakarta pada khususnya, dan secara nasional pada umumnya. Intervensi politik yang cukup kuat dan terjadi secara terbuka melemahkan independensi korporasi. Selain itu birokrasi erat kaitannya dengan keteraturan juga kompleksitas yang tinggi yang kadang memperlambat jalannya organisasi. Terkadang akibat dari birokrasi yang ada perusahaan lambat untuk merespon perubahan-perubahan yang terjadi akibat situasi sosial dan ekonomi.

c. Faktor Peluang (Opportunity)

BUMD Pasar Jaya sebagai badan yang sudah berdiri lama memiliki pasar dan sudah dikenal baik oleh masyarakat. Artinya BUMD Pasar Jaya memiliki kepercayaan yang tinggi dan ini adalah sebuah peluang dalam persaingan bisnis. Selain itu kesempatan bisnis yang dapat dikembangkan oleh Pasar Jaya juga tinggi ditambah dengan kuatnya dukungan dari pemerintah khususnya DKI Jakarta. Peluang-peluang yang disebutkan juga berdampak pada terbukanya kerjasama dengan pihak lain yang lebih mudah.

d. Faktor Ancaman (Threats).

Bisnis pangan sudah merambah ke berbagai pihak, sehingga menimbulkan persaingan bisnis dengan pihak swasta. Lingkungan sekitar yang berubah dengan cepat juga mempengaruhi lingkungan bisnis yang ada hal ini salah satunya disebabkan selain perubahan sosial ekonomi juga perkembangan yang pesat atas keberadaan teknologi. Meski organisasi sudah berkomitmen terhadap pelayanan kepada masyarakat dan terhadap tugas dan tanggung jawabnya, namun masih ada oknum yang melakukan hal kurang berkenan dan menimbulkan moral hazard pengurusnya.

Sebelum menganalisa lebih lanjut memakai pendekatan SWOT, akan ditentukan terlebih dahulu evaluasi faktor internal dan eksternal organisasi. Dalam hal analisis dengan menggunakan matriks IFAS (Internal Factors Analysis Summary) dan EFAS (External Factors Analysis Summary). Analisis ini digunakan sebagai identifikasi berbagai faktor dengan sistematis melalui penguatan aspek kekuatan (strengths) dan peluang (opportunities) juga, disisi lain dapat meminimalisir kelemahan (weakness) dan ancaman. Lebih lanjut, menurut Huda (2017) Penyusunan matriks EFAS dan IFAS dilakukan berdasarkan skala berjenjang antara 1 sampai 4. Skala 1 sampai 4 sebagai definisi operasional kekuatan dan peluang. Sedangkan skala 4 sampai 1 sebagai definisi operasional kelemahan dan ancaman, nilai skala ditetapkan atas dasar prioritas. Dengan hasil sebagai berikut:

Kategori	Bobot	Rating	Skor
Strength			
Pemegang saham yang kredibel	0,25	4	1,00
Landasan hukum yang formal	0,19	4	0,75
Modal yang terjamin	0,25	4	1,00
Jaminan akan governance	0,13	4	0,50
Terbukanya akses bisnis	0,19	4	0,75
	1		4
Weakness			
Intervensi politik	0,24	3	0,71
Kurangnya independensi korporasi	0,18	4	0,71
Birokrasi yang kompleks	0,18	3	0,53
Jaminan akan governance	0,18	3	0,50
Ketidaksiapan akan perubahan	0,18	3	0,71
	1,00		3,18

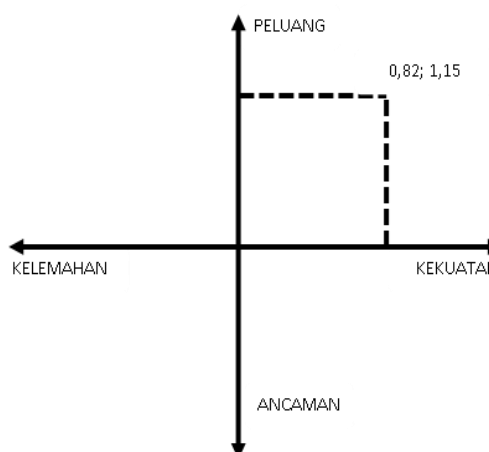
Berikut tabel EFAS dengan penghitung, sebagai berikut:

Kategori	Bobot	Rating	Skor
Opportunity			
Peluang bisnis yang tinggi	0,24	4	0,94
Tingkat kepercayaan masyarakat yang tinggi	0,18	4	0,71
Dukungan dari pemerintah	0,24	4	0,71
Peluang yang tinggi akan kerjasama dengan pihak lain	0,18	4	0,71
	1,00		3,59
Threatens			
Persaingan bisnis yang ketat	0,17	4	0,67
Perubahan situasi bisnis yang cepat	0,17	3	0,50
Moral hazard oknum pegawai	0,22	2	0,44
Perkembangan teknologi yang tinggi	0,17	3	0,50
	1		2,44

Sumber: Olahan peneliti 2022

Setelah tabel IFAS dan EFAS selesai dipetakan, maka perlu dilakukan penyusunan matrik gabungan antara IFAS dan EFAS, hal ini dilakukan sebagai upaya menentukan strategi utama atau grand strategy. Adapun cara yang dilakukan adalah menggunakan diagram kartesius SWOT, sebagai berikut:

Matriks IFAS dan EFAS		
Sub total Strength (S) : 4,00	SubTotal Weakness (W): 3,18	S-W : 0,82
Subtotal Opportunity (O) : 3,59	SubTotal Threat (T): 2,44	O-T: 1,15
Subtotal S+O: 7,59	Subtotal W + T: 5,62	



Gambar 2. Diagram Kartesius hasil SWOT

Berdasarkan diagram kartesius di atas, nilai IFAS adalah 0,82 dan nilai EFAS sejumlah 1,15. Strategi untuk pengembangan ekonomi yang perlu perhatian khusus adalah Kuadran I (Sunarti dan Mawardi, 2017) sehingga BUMD memiliki peluang juga kekuatan untuk mencapai tujuan pengembangan ekonomi melalui pangan.

Dapat dikatakan bahwa, dalam menentukan strategi terdapat peluang sekaligus kekuatan yang dimiliki BUMD untuk pengembangan ekonomi. Untuk itu strategi yang dipilih adalah strategi yang

menganalisa kekuatan dan kesempatan. Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, pada kuadran pertama, situasi yang terjadi dalam kondisi positif dimana organisasi mempunyai peluang yang tinggi, untuk itu strategi yang cocok dengan kondisi ini adalah kebijakan agresif. Setelah strategi telah diidentifikasi, maka penyeleksian strategi untuk operasionalnya, data didapat melalui hasil analisis empat strategi operasional. Sehingga strategi yang paling tepat diterapkan adalah Strategi Kekuatan dan Kesempatan (strategi S--O) dengan uraian sebagai berikut:

Matrik Analisa SWOT

	Strength
IFAS	a. Kuatnya kredibilitas pemegang saham b. Kuatnya landasan hukum operasional c. Adanya jaminan ketercukupan modal d. Kuatnya jaminan untuk governance e. Terbukanya akses bisnis
EFAS	
Opportunity 1. Tingginya peluang kesempatan bisnis 2. Tingginya tingkat kepercayaan masyarakat 3. Kuatnya dukungan pemerintah 4. Terdapatnya captive market 5. Terbukanya kerja sama dengan pihak lain	Strategi S-O 1. Peningkatan kolaborasi seluruh pemangku kepentingan dengan prinsip kemitraan 2. Peningkatan aksi bisnis dengan focus digitalisasi aksi korporasi 3. Peningkatan Ekspansi Bisnis Eksisting 4. Peningkatan Kerjasama Antar Daerah

Sumber: Olahan peneliti 2022

Setelah konsep dipetakan dalam masing-masing Analisis SWOT, kemudian kebijakan yang akan diambil pun dianalisa, sebagai berikut:

Mendorong prinsip kemitraan melalui kolaborasi antar seluruh stakeholder

Respons terhadap perubahan dalam kebijakan perlu dicermati dan diterapkan secara kolaboratif. Perubahan yang ada bisa saja terdapat peningkatan aktor dalam kebijakan, permasalahan yang semakin kompleks, kemampuan penyelenggaraan negara yang terbatas padahal pihak eksternal semakin meningkat kemampuannya juga sikap kritisnya. Saat perubahan terjadi, pemerintah harus responsive dalam mengatasi perubahan dengan tetap memperhatikan factor-faktor eksternal sekitar kita. Kolaborasi yang terjadi baik dengan masyarakat maupun pihak swasta dipengaruhi oleh situasi sosial ekonomi serta kebijakan yang ada.

Terdapat dua makna dalam kolaboratif, yaitu dalam cakupan kata proses dan kolaborasi dalam arti normatif. Dalam arti proses, dilihat dari serangkaian proses atau cara dalam upaya mengelola suatu kelembagaan. Pada konteks ini, sejumlah stakeholder lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah terlibat sesuai dengan kepentingan dan tujuannya. Unsur yang terlibat dalam kolaborasi ini adalah lembaga-lembaga pemerintah, LSM lokal, swasta atau juga dapat mencakup lembaga-

lembaga yang berafiliasi dengan pemerintah dan kemudian berkolaborasi dengan LSM lokal yang didanai oleh pemerintah/swasta/LSM/ orang-orang dari luar negeri. Pada kolaborasi ini, unsur-unsur yang terlibat melakukan tata kelola bersama secara intensif, namun unsur yang terlibat belum tentu memiliki bobot yang sama. Sementara dalam definisi normatif, kolaboratif merupakan ide atau tujuan filosofi bagi pemerintah untuk mencapai interaksinya dengan mitra atau mitra. Sehingga pemahaman kolaborasi di sini sangat luas, tetapi semua pemangku kepentingan yang termasuk di dalamnya masih memiliki tujuan yang sama.

Peningkatan digitalisasi

Platform digital merambah dunia ke berbagai sendi kehidupan, ke depan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence akan menjadi hal yang lazim diterapkan. Kelembagaan sisi suplai akan diintegrasikan sebaiknya didigitalisasi sesuai dengan kebutuhan yang ada. Sementara itu, platform kelembagaan sebaiknya disatukan secara bertahap dengan melibatkan rantai nilai pangan dan pertanian jadi diharapkan produk-produk pangan mampu diterima oleh standar persyaratan pasar yang dapat mencakup kebutuhan secara signifikan.

Peningkatan Ekspansi Bisnis yang ada

Perubahan kondisi sosial dan ekonomi yang terjadi secara cepat memerlukan respon dalam menghadapinya, pengembangan bisnis perlu dilakukan oleh Pasar Jaya untuk menjawab kebutuhan masyarakat. Dalam hal ini, ekspansi bisnis yang dapat dilakukan Pasar Jaya adalah optimalisasi manfaat pasar melalui peningkatan fasilitas baik fisik maupun non fisik.

Peningkatan Kerjasama Antar Daerah.

Kerjasama antar daerah adalah upaya yang dilakukan untuk mengoptimalkan sumber daya yang ada. Konsep kerjasama sendiri dianggap sebagai bentuk efisiensi dan kualitas pelayanan. Melalui kerjasama, diharapkan ada ilmu dan khasanah baru yang membuat pelayanan menjadi lebih prima, tepat sasaran dan efektif.

SIMPULAN

Dengan melakukan kajian melalui pendekatan IFAS, EFAS, dan SWOT maka bisa diambil kesimpulan yaitu:

1. DKI Jakarta memiliki ketergantungan sangat tinggi terhadap pangan yang disebabkan ketersediaan lahan yang minim, sementara daerah lain menyediakan supply pangan, seperti dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur dan dari luar Jawa juga dari luar negeri.
2. Dari analisis yang matriks EFAS dan IFAS melalui diagram Kartesius maka bisa disimpulkan pada strategi yang baik dilakukan adalah Strength dan Opportunity yang termasuk strategi pertumbuhan (growth).
3. Dari strategi kekuatan dan peluang terdapat hal-hal yang dapat dilakukan yakni: mendorong kolaborasi semua stakeholder yang dilakukan dengan kemitraan yang kuat, usaha yang memfokuskan aksi digitalisasi korporasi, perluasan bisnis yang ada dan kerjasama antar daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- J. Aczél, T. L. Saaty, Procedures for synthesizing ratio judgements, *Journal of Mathematical Psychology*, Volume 27, Issue 1, March 1983, Pages 93-102, [https://doi.org/10.1016/0022-2496\(83\)90028-7](https://doi.org/10.1016/0022-2496(83)90028-7)
- Creswell, J. W. (2016). *Research design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran* (Edisi 4). Pustaka Pelajar.
- Dragouni, M., & Fouseki, K. (2018). Drivers of community participation in heritage tourism planning: an empirical investigation. *Journal of Heritage Tourism*, 13(3), 237-256.
- FAO (2008). An introduction to the basic concepts of food security. Rome Food and Agriculture Organisation. www.fao.org/3/a-al936e.pdf
- Keputusan Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibukota Jakarta No. Ib.3/2/15/66 pada tanggal 24 Desember 1966. lalu pengesahan oleh Menteri Dalam Negeri lewat Keputusan No. Ekbang 8/8/13--305 tanggal 23 Desember 1967.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015
- Rangkuti, F. (2005). *Analisa SWOT : Teknik Membedah Kasus Bisnis*. PT Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Istiqomah, I., & Andriyanto, I. (2018). Analisis SWOT dalam Pengembangan Bisnis (Studi pada Sentra Jenang di Desa Kaliputu Kudus). *BISNIS: Jurnal Bisnis Dan Manajemen Islam*, 5(2), 363-382.
- Rangkuti, Freddy, (2001). *Analisis SWOT Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Reorientasi Konsep Perencanaan Strategis untuk Menghadapi Abad 21. Gramedia. Jakarta 2003.
- Saaty, T. L. (2013). *Fundamentals of the Analytic Hierarchy Process*. *The Analytic Hierarchy Process in Natural Resource and Environmental Decision Making*, 3, 15
- Undang undang No 18 tahun 2012 tentang Pangan, Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi DKI Jakarta 2017 – 2022